

**PERANAN SUTAN SJAHRIR DALAM USAHA
MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA (1945-1950)**

Adika Wahyudi¹ dan Umi hartati^{2*}

^{1,2}Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro
Email: umihartati46@yahoo.com

ABSTRACT

The problem in this research is the many obstacles that occur in the effort to maintain independence in Indonesia in 1945-1950. The purpose of this study is to analyze and describe the role of Sutan Sjahrir in Efforts to Maintain Indonesian Independence in the field of Politics. The research method uses historical research methods. Based on the results of the study, it can be concluded that Sjahrir is a combination of sharpness of knowledge and depth of mind. He is able to live in the tension between global and local. When Japan colonized Indonesia, Sjahrir had predicted that the Japanese would not last long in Indonesia. After two months of the Indonesian people gaining independence, Sjahrir felt that independence was only for the interests of the state, nation and also for political interests. The politics that Sjahrir wanted to implement was aimed more at prioritizing human freedom and the interests of society rather than national independence. Even though the Indonesian state has achieved independence, there are still things that are far more important, namely peace, prosperity, and progress for the people. Sutan Sjahrir is not just fighting for Indonesia's independence to be free from colonialism from other nations, but how to gain independence for small communities individually.

Keywords: Sutan Sjahrir's Role, Efforts to Realize Independence, Political Sector

PENDAHULUAN

Kemerdekaan yang telah diperoleh oleh bangsa Indonesia bukan sebagai pemberian dari penjajah, akan tetapi sebagai hasil dari perjuangan panjang dan berat yang telah dilalui dalam kurun waktu yang cukup lama. Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah hasil akhir dari perjuangan itu, akan tetapi awal perjuangan baru dalam membangun tatanan berbangsa dan bernegara. Untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengupayakan kedaulatan dilakukan perjuangan fisik dan non fisik.

Perjuangan dan revolusi mempertahankan kemerdekaan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu cara-cara diplomasi dan cara-cara militer. Perjuangan militer (atau perlawanan bersenjata) adalah satu elemen dari tindakan-tindakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Selain melalui perlawanan bersenjata, Indonesia juga berusaha untuk mempertahankan kemerdekaannya melalui jalur negosiasi dengan Belanda serta mencari dukungan dari dunia internasional. Hal inilah yang disebut sebagai perjuangan diplomasi. Jalur diplomasi umumnya diambil setelah terjadi kebuntuan dalam perjuangan melalui jalur militer.

Meskipun, Indonesia menganggap memperjuangkan kemerdekaan yang telah mereka raih, Belanda tidak menganggap demikian. Belanda masih menganggap bahwa koloni Hindia-Belanda (Nederlands-Indië) hanya sebatas direbut oleh Jepang semasa perang dunia || atau perang pasifik. Dengan berakhirnya perang pasifik dan kekalahan Jepang, Belanda menganggap perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah sebuah pemberontakan. Untuk itulah Belanda menganggap kepulauan mereka dengan bantuan tentara

sekutu ke Indonesia dianggap sebagai bentuk aksi polisi (*polititionele acties*) untuk meredakan kekacauan politik yang mereka anggap dalam bentuk kemerdekaan tersebut.

Kegiatan politik Sjahrir pada awal kemerdekaan Indonesia ialah sikap non kooperasi, sedikit demi sedikit ditinggalkan dan berbalik menjadi kooperasi dengan pihak lawan. Ia merasa bahwa dengan kekerasan dan senjata, bangsa Indonesia tidak mampu menandingi kekuatan lawan yang telah menggunakan taktik, strategi dan teknik, serta persenjataan modern. Sehingga Sjahrir telah menentukan langkah dalam kabinet yang dipimpinnya, yaitu perjuangan mempertahankan Indonesia dengan diplomasi. Diplomasi merupakan kunci bagi kelangsungan hidup negara Republik Indonesia

Kegiatan politik Sjahrir semakin menonjol ketika ia bersama Hatta mendirikan sebuah partai baru, yakni PNI-Baru (Partai Nasional Indonesia). Dalam Kongres I di Bandung pada bulan Juni 1932 Sjahrir terpilih sebagai ketua Pimpinan Umum PNI Baru (Syahbudin, 2011: 22-23). Pimpinan Sjahrir ditandai oleh pengarahannya konsolidasi ke dalam untuk menumbuhkan kematangan politik dan jiwa kritis. Tidak lama setelah itu, Hatta kembali ke Hindia dan kepemimpinan PNI-Baru diserahkan kepadanya. Sjahrir bermaksud kembali ke Belanda untuk melanjutkan studinya. Namun belum sempat ia meninggalkan Hindia, para pemimpin PNI-Baru ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Kegiatan PNI-Baru dianggap berbahaya karena melakukan propaganda melalui tulisan-tulisan yang dimuat dalam majalah *Daulat Rakjat* (Hatta, 2010: 319). Sebagai tokoh pejuang bangsa Sjahrir memang lebih mengedepankan politik diplomasi dibandingkan dengan adu fisik. Sjahrir menulis buklet berjudul *Perjuangan Kita* untuk menyulut semangat perjuangan pemuda Indonesia. Namun hasil dari perjanjian Linggarjati tidak mampu membuat Sjahrir bertahan lama sebagai Perdana Menteri oposisi dari sayap kiri. Bagi pihak lain Sjahrir memberi konsesi yang besar bagi Perjanjian Linggarjati. Akhirnya, ia memutuskan untuk mundur, walaupun Soekarno masih tetap menginginkan Sjahrir tetap memegang jabatan yang keempat kali, tetapi tanpa hasil (Kasenda, 2014: 173).

Tujuan Penelitian ini dalam meneliti peranan Sjahrir dalam kurun waktu 1945 hingga 1950, melalui penelitian ini juga kiranya dapat memberikan pemahaman dan kontribusi pemikiran yang jelas dan kongkrit bagi kita semua terutama dalam memahami napak tilas perjuangan dan pemikiran Sutan Sjahrir dan bermaksud mengetahui diplomasi Sjahrir dari kerangka konsep diplomasi yang diciptakan dari dalam negeri Indonesia yaitu diplomasi perjuangan dengan memberi perhatian utama kepada metode yang digunakan dan perilaku Sjahrir dalam menjalankan diplomasi itu.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah banyaknya rintangan yang terjadi dalam usaha untuk mempertahankan kemerdekaan di Indonesia tahun 1945-1950. Dan Tujuan kajian ini adalah menguraikan agar memahami arah kegiatan yang akan dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Dalam Penulisan sejarah ini peneliti juga harus menyesuaikan pula antara konsep yang didapat dari penulisan sejarah terdahulu, Skipsri Mimam Hasibuan yang berjudul *Pemikiran dan peran Sutan Sjahrir dalam dinamika*

politik indonesia; Fakultas Sosial dan Politik Universitas Sumatra Utara. Hasil penelitian ini adalah Sutan Sjahrir sebagai tokoh yang paling kontroversial pada masa itu karena pemikiran Sutan Sjahrir sangat bertolak belakang dengan tokoh-tokoh kemerdekaan yang ada pada saat itu, pemikiran Sutan Sjahrir mempunyai ciri khas yang kompleks karena dalam pemikirannya lebih menekankan kepada faktor masyarakat dan kesejahteraan sosial, yang lebih akrab disebut sebagai Socialisme Kerakyatan.

METODE

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian historis, Penelitian historis adalah penelitian yang menelaah sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis (Daliman, 2012:50). Atau dapat dengan kata lain yaitu penelitian yang bertugas mendeskripsikan gejala, tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Heuristik

Menurut Daliman (2012:51):

“Dengan memasuki tahap pengumpulan sumber (heuristik) seorang peneliti sejarah memasuki lapangan (medan) penelitian. Dilapangan ini kemampuan teoritik yang bersifat deduktif-spekulatif sebagai tertuang dalam proposal atau rancangan penelitian akan diuji secara induktif-empirik atau pragmatif.”

- Kritik Intern

Kritik Internal adalah uji kebenaran mengenai informasi suatu dokumen, Sebagaimana yang dikemukakan oleh Daliman (2012:72) sebagai berikut “Kritik Intern ialah ingin mempertahankan, apakah isi informasi yang terkandung dalam suatu dokumen benar dan dapat dipercaya, *kredibel* dan *reliable*

- Kritik Ekstern

Kritik Eksternal adalah penelitian untuk menguji otentisitas (keaslian) suatu sumber, agar diperoleh sumber yang sungguh-sungguh asli dan bukan tiruan atau palsu

Studi Kepustakaan

Kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain yang dimaksud studi kepustakaan.

Teknik Analisis Data

Dalam proses suatu penelitian setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa kebenarannya. Untuk hal tersebut langkah yang digunakan peneliti dalam menganalisis data antara lain:

Interpretasi

Interprestasi adalah sebuah penafsiran dari suatu fakta sejarah. Hal ini dikemukakan oleh Daliman (2012:83) sebagai berikut: "Interprestasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka rekonstruksi realitas masa lampau".

Historiografi

Historiografi merupakan suatu pandangan sejarawan terhadap suatu peristiwa sejarah yang dituangkan dalam sebuah tulisan dengan kejelasan, kekuatan, dan ekspresi bahasa yang baik ditampilkan oleh sejarawan. Menurut Daliman (2012:99) sebagai berikut: "Penulisan sejarah (historiografi) menjadi sarana mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji (verifikasi) dan diinterpretasi".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemerdekaan suatu bangsa dapat diperoleh karena adanya sosok-sosok pemberani yang mau berjuang untuk memperoleh haknya sebagai rakyat. Termasuk diantaranya adalah Indonesia yang menuju pintu kemerdekaannya, atas peran serta dari salah seorang tokoh yang religius dan gigih. Dia adalah Sutan Sjahrir, seorang tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan berani menentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Belanda dan Jepang serta berusaha mewujudkan dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Bagi Sjahrir Negara Republik Indonesia harus memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan dan demokrasi, apalagi karena harus mengantisipasi segala kemungkinan berkaitan dengan keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Masalahnya mendesak karena Sekutu yang diboncengi agen dan serdadu NICA sudah datang untuk mengambil alih Indonesia dari tangan Jepang. Salah satu masalah yang berkembang saat itu adalah bahwa Sekutu akan mengadili para penjahat perang, termasuk para pemimpin Indonesia yang berkolaborasi dengan fasisme Jepang sehingga jalan keluar satu-satunya adalah Republik Indonesia haruslah memiliki suatu lembaga legislatif yang merupakan lembaga yang memperjuangkan aspirasi-aspirasi dan kelompok-kelompok politik yang hidup dalam masyarakat Indonesia bebas dari pengaruh (fasisme) Jepang. Selain itu pemerintah juga harus dipimpin oleh tokoh Indonesia yang anti fasisme Jepang.

Mrazek, (2011:97) menyatakan

"KNIP lebih mencerminkan suatu lembaga dengan keanggotaan dan fungsi legislatif yang mencerminkan aspirasi-aspirasi (kelompok politik) yang hidup, apalagi karena kepala pemerintah (Perdana Menteri) bertanggung jawab kepada KNIP. Presiden tidak lagi berhak membuat undang-undang. Mulai saat itu juga Komite menjadi badan legislatif yang bertugas menyusun undang-undang dan garis-garis besar haluan negara. Maklumat Nomor X menandakan berakhirnya kekuasaan luar biasa Presiden dan riwayat Komite Nasional sebagai pembantu Presiden".

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dijelaskan bahwa Presiden tidak lagi berhak membuat undang-undang. Mulai saat itu juga Komite menjadi badan legislatif yang bertugas menyusun undang-undang dan garis-garis besar haluan negara.

Prestasi Sjahrir di dalam KNIP membuktikan bahwa ia memahami secara mendalam masalah Negara Republik Indonesia yang baru lahir serta tahu apa saja yang harus dilakukan. Lagi pula ia mendapat dukungan kuat di KNIP. Sjahrir pun menyusun dan memimpin suatu kabinet parlementer yakni yang bertanggung jawab kepada legislatif (dalam hal ini KNIP). Banyak yang setuju dan juga tidak setuju dengan Sjahrir. Tetapi sejarah memperlihatkan, begitu dia menjadi Ketua Badan Pekerja Komite Nasional, lahir Maklumat Nomor X yang memungkinkan lahirnya partai-partai politik di Indonesia, (Tempo:44-45), berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa ketua badan pekerja komite lahir berdasarkan maklumat nomer X.

Peran Sutan Sjahrir Pasca Kemerdekaan Indonesia

Perpecahan antara Sjahrir dan Amir Syarifuddin disebabkan karena Amir Syarifuddin menambahkan faham komunisme pada prinsip utama yang menjadi landasan Partai Sosialis sedangkan Sutan Sjahrir berserta kelompoknya menolak dengan tegas pemahaman tersebut. Dalam pemikiran Sutan Sjahrir, penambahan faham komunisme pada prinsip utama yang menjadi landasan Partai Sosialis tersebut akan mempengaruhi arah pemerintahan yang totaliter. Dengan demikian sangat bertentangan dengan pemikiran politik Sutan Sjahrir yang menekankan adanya kebebasan, universalitas humanis dan sosialis kerakyatan. Setelah keluar dari Partai Sosialis, pada tanggal 12 Februari 1948 Sutan Sjahrir bersama teman-temannya mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Partai Sosialis Indonesia merupakan partai politik yang beranggotakan tokoh-tokoh intelektual Indonesia yang sebelumnya tergabung dalam kelompok Pendidikan Nasional Indonesia; sebuah partai yang bertujuan untuk ikut meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh utama yang berperan besar dalam membentuk pemikiran politik kelompok dan partai ini ialah Sutan Sjahrir, Soedjatmoko, Saleh Mangoendingrat, Soebadio Sastrosatomo, Hamid Algadri, Siti Wahyoenah Saleh Mangoendingrat, Hoegeng I, Santoso, Lintong Moelia Sitorus, Soebianto Djojohadikoesoemo, Daan Jahja, Aboebakar Loebis, Wibowo, serta Ali Boediardjo, (Nur Indro, 2009:4).

Nur Indro, (2009:5), menyatakan bahwa

“Bagi Sutan Sjahrir demokrasi merupakan jiwa perjuangan bangsa. Dalam pemikirannya, perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia tidak didasarkan kepada nasionalisme tetapi kepada faham demokrasi. Dengan demikian kebebasan dari hasil perjuangan tersebut dapat dimiliki oleh segenap rakyat Indonesia”.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dijelaskan bahwa pemikiran dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia tidak didasarkan oleh Nasionalis saja tetapi kepada faham demokrasi.

Aktivitas-aktivitas Sutan Sjahrir sebelum Kemerdekaan Indonesia

Pada tanggal 29 Desember 1929 pemerintah kolonial Belanda menangkap Sukarno dan tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan pihak Belanda menganggap bahwa Sukarno dan anggota partainya melakukan kegiatan revolusioner untuk melawan pihak Belanda. Bagi Hatta dan Sjahrir,

penangkapan tersebut menyurutkan semangat kaum pergerakan dan kejadian tersebut merupakan suatu sinyal bahwa keadaan di Tanah Air sedang menghadapi masalah serius.

Menurut Tempo, edisi maret 9-15, (2009:28) bahwa :

“Terlebih setelah mendengar bahwa PNI justru dibubarkan oleh aktivisnya sendiri, yang kemudian membentuk Partai Indonesia (Partindo), dimana Gerakan nasionalisme kultural Partindo dinilai terlalu lemah dan mengecewakan kaum nasionalis, mereka berharap ada tokoh yang lebih berani”.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dijelaskan bahwa gerakan nasionalisme kultural Partindo dinilai terlalu lemah dan mengecewakan kaum nasionalis, mereka berharap ada tokoh yang lebih berani dalam berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Para anggota yang kecewa dengan dibubarkannya PNI membentuk *studieclub*. mereka menyebut diri mereka sebagai Golongan Merdeka. Sejak bulan Juni 1931 Hatta dan Sjahrir mulai menunjukkan dukungan bagi Golongan Merdeka. Pada akhir bulan September atau awal Oktober 1931, club-club tersebut membentuk Komite Golongan Merdeka di Batavia. Komite tersebut mengadakan pertemuan Golongan Merdeka di Batavia pada tanggal 31 Oktober 1931. Acara pokoknya adalah membentuk suatu partai baru. Yang kemudian memutuskan untuk membentuk suatu wadah bernama Pendidikan Nasional Indonesia, yang kemudian lebih dikenal dengan PNI-Baru atau PNI Pendidikan. “Tugas utama partai tersebut untuk sementara adalah mendidik calon pemimpin pergerakan kebangsaan”, (Tempo, 2009:349).

Peran Diplomasi Sutan Sjahrir dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia (1945-1959).

Ketika Kekaisaran Jepang sudah mendekati keruntuhannya, pada tanggal 8 Agustus Sukarno dan Hatta dipanggil ke Saigon untuk bertemu dengan Pangeran Terauchi, Panglima Tertinggi Tentara Jepang Wilayah Selatan. Pesan yang disampaikan oleh Terauchi adalah bahwa penentuan waktu serah terima kemerdekaan sekarang berada di tangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Setelah membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, disitu diputuskan bahwa Panitia Persiapan Kemerdekaan harus bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945 di Jakarta. Sebelum berangkat ke Saigon, Hatta dan Sjahrir telah sepakat bahwa saat yang menentukan bagi usaha revolusioner besar-besaran, yaitu secara terang-terangan menggabungkan berbagai kekuatan legal di bawah Sukarno-Hatta dan gerakan bawah tanah dalam usaha mendirikan negara Indonesia yang merdeka.

Ledge, (2013: 171) bahwa :

Pada tanggal 14 Agustus rombongan kembali ke Jakarta tanpa mengetahui perihal telah dijatuhkannya bom atom yang pertama serta akan menyerahnya Jepang, dan langsung terlibat dalam perdebatan sengit tentang strategi yang akan ditempuh untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada mulanya, Sjahrir merupakan salah satu peserta utama dalam perdebatan itu.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dijelaskan bahwa terjadi perdebatan sengit tentang strategi yang akan di tempuh untuk memproklamasikan kemerdekaan, dan Sjahrir adalah salah satu peserta perdebatan itu. Ketika berita menyebar pada rakyat Indonesia bahwa pada tanggal 14 Agustus Jepang telah menyerah kepada Sekutu, diam-diam Hatta berunding dengan Sjahrir yang mendesak agar proklamasi kemerdekaan harus diadakan sesegera mungkin karena jika menunggu tanggal 19 Agustus mungkin akan terlambat.

Belanda, yang merupakan bagian dari Sekutu belum menerima kemerdekaan Indonesia. "Sjahrir, yang sebelumnya sudah memprediksi sikap Sekutu itu berpendirian, menghadapi Belanda, termasuk Sekutu, tidak bisa lagi dengan senjata, tapi harus lewat diplomasi", (Mrazek, 2011: 97). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam menghadapi Sekutu dan Belanda tidak bisa lagi dilawan dengan senjata, tetapi harus lewat diplomasi.

Sebagai ketua KNIP yang baru, Sjahrir mengarahkan agar hendaknya keanggotaan KNI (Komite Nasional Indonesia), baik di pusat maupun di daerah-daerah, lebih mencerminkan aspirasi politik nasional. Dan sejalan dengan itu, atas saran Sjarir selaku ketua KNIP, wakil presiden yaitu Hatta pada tanggal 3 November 1945 mengumumkan Maklumat X tentang pembentukan partai-partai di Indonesia.

KESIMPULAN

Sjahrir merupakan perpaduan antara ketajaman ilmu pengetahuan dan kedalaman batin. Ia mampu hidup dalam ketegangan antara global dan lokal. Ketika Jepang menjajah Indonesia, Sjahrir sudah memprediksi bahwa bangsa Jepang tidak akan bertahan lama berada di Indonesia, Politik yang ingin diterapkan Sjahrir ditujukan lebih untuk mengutamakan kebebasan manusia dan kepentingan masyarakat daripada kemerdekaan nasional. Sutan Sjahrir bukan hanya sekedar memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk dapat terbebas dari penjajahan bangsa lain tetapi bagaimana caranya untuk memperoleh kemerdekaan bagi masyarakat kecil secara individu.

SARAN

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sutan Sjahrir berperan dalam mewujudkan Kemerdekaan Indonesia di Bidang Politik, diharapkan lebih mengembangkan penelitian Sutan Sjahrir dalam bidang lain-lain dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Daliman. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Gumelar, H. P. A., Hidayat, B., & Kuswono, K. (2019). Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Android Materi Sejarah Pergerakan SMA di Lampung. *SWARNADWIPA*, 3(1).

Hartati, U., & Refa'i, R. A. (2019). Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Sejarah Masa Pendudukan Jepang di Indonesia Berbasis Karakter Untuk Kelas XI SMA Negeri 1 Pasirsakti. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), 70-83.

Hatta, Mohammad. (2010). *Memoir*, Jakarta: Tintamas.

Kasenda, K.M.L. 2014. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*. Jakarta: Gunung Agung.

Kuswono, K. (2020). *Metro Tempo Dulu: Sejarah Kota Metro Era Kolonisasi 1935-1942* (B. Hidayat & U. Hartati (eds.)).

Kuswono, K., Sumiyatun, S., & Setiawati, E. (2021). Pemanfaatan Kajian Sejarah Lokal Dalam Pembelajaran Sejarah di Indonesia. *JURNAL LENTERA PENDIDIKAN PUSAT PENELITIAN LPPM UM METRO*, 6(2), 206-209.

Legge, J.D. 2013. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan PerananKelompok Sjahrir*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Mandaralam, Syahbudin. (2011). *Apa dan Siapa Sutan Syahrir*. Jakarta: PT. Rosda Jayaputra.

Mrazek, Rudolf. 2011. *Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Praseyo, A. B., & Hartati, U. (2022). Inventarisasi Potensi Cagar Budaya Peninggalan Masa Penjajahan Belanda Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019. *SWARNADWIPA*, 3(3).